

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini hutan mangrove di dunia hanya tersisa sekitar 17 juta hektar ; 22% dari luar tersebut terdapat di Indonesia, namun juga telah mengalami kerusakan, bahkan sebagian besar telah berubah status peruntukannya (Arief, 2003).

Hutan mangrove merupakan jalur hijau daerah pantai yang mempunyai fungsi ekologis dan sosial ekonomi. Berdasarkan hasil identifikasi tahun 1997-2000 luas potensial habitat mangrove di Indonesia  $\pm$  8,6 juta ha yang terdiri dari 3,8 juta Ha dalam kawasan hutan dan 4,8 juta Ha di luar kawasan. Saat ini 1,7 juta Ha berada dalam kawasan hutan dan 4,2 juta Ha dari hutan mangrove berada di luar kawasan hutan dalam kondisi rusak Permenhut (dalam Wahyuni, 2009)

Menurut Dephut (dalam Isma, 2009), dari beberapa penelitian yang dilakukan bahwa luas hutan mangrove di Indonesia kini menurun tajam pada tahun 1982 mencapai 4.251.011 ha tahun 1992 berkurang menjadi 3.137.000 ha. Dengan demikian selama tahun 1992, luas hutan mangrove Indonesia mengalami pengurangan sebesar 30%. Penyebab penyusutan ini umumnya adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang tidak terencana, pemanfaatan secara berlebihan, kesalahan dalam pengelolaan ditunjang lagi oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Contohnya antara lain adanya pencurian kayu mangrove, pengalihfungsian hutan mangrove menjadi lahan tambak , pembangunan objek wisata dan kegiatan lainnya.

Hutan mangrove di Indonesia berada dalam ancaman yang meningkat dari berbagai pembangunan, diantara yang utama adalah pembangunan yang cepat yang

terdapat di seluruh wilayah pesisir yang secara ekonomi vital. Konservasi pemanfaatan lain seperti untuk budidaya perairan, infrastruktur pantai termasuk pelabuhan, industri, pembangunan tempat perdagangan dan perumahan, serta pertanian, adalah penyebab berkurangnya sumber daya mangrove dan beban berat bagi hutan mangrove yang ada. Selain ancaman yang langsung ditujukan pada mangrove melalui pembangunan tersebut, ternyata sumber daya mangrove rentan terhadap aktivitas pembangunan yang terdapat jauh dari habitatnya.

Pada umumnya jenis-jenis mangrove dimanfaatkan secara lokal untuk kayu bakar dan bahan bangunan lokal. Komoditas utama kayu mangrove untuk diperdagangkan secara internasional adalah arang yang berasal dari *Rhizophora spp.*, yang mempunyai nilai kalori sangat tinggi. Ancaman yang paling serius bagi mangrove adalah persepsi di kalangan masyarakat umum dan sebagian besar pegawai pemerintah yang menganggap mangrove merupakan sumber daya yang kurang berguna yang hanya cocok untuk pembuangan sampah atau dikonversi untuk keperluan lain. Sebagian besar pendapat untuk mengkonversi mangrove berasal dari pemikiran bahwa lahan mangrove jauh lebih berguna bagi individu, perusahaan dan pemerintah daripada sebagai lahan yang berfungsi secara ekologi. Apabila persepsi keliru tersebut tidak dikoreksi, maka masa depan mangrove Indonesia dan juga mangrove dunia akan menjadi sangat suram.

Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara merupakan wilayah pesisir yang mempunyai hamparan mangrove yang sangat luas. Daerah pantai di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara didominasi oleh pantai berpasir, baik pasir *kwarsa* maupun *feldspar* namun terdapat juga lumpur. Kawasan ini cukup subur, suhu udara tinggi, kelembaban udara tinggi dan curah hujan relatif tinggi sehingga berpotensi untuk

dimanfaatkan. Topografi pantai umumnya landai dengan laut yang dangkal sangat berpotensi untuk dijadikan objek wisata dan dapat mengancam keberadaan hutan mangrove.

Melihat pentingnya ekosistem mangrove bagi kehidupan contohnya manfaat ekonomis hutan mangrove diantaranya terdiri atas hasil berupa kayu, dan manfaat ekologisnya terdiri atas fungsi lindungan baik lingkungan ekosistem daratan dan lautan maupun habitat jenis fauna. Fungsi tersebut antara lain: sebagai proteksi abrasi/erosi, gelombang atau angin kencang, pengendalian intrusi air laut, habitat berbagai fauna, sebagai tempat mencari makan, memijah dan berkembang biak berbagai jenis ikan dan udang, pembangunan lahan melalui proses sedimentasi, memelihara kualitas air (mereduksi polutan, pencemaran air), penyerap CO<sub>2</sub> dan penghasil O<sub>2</sub> yang relatif tinggi dibandingkan tipe hutan lain. Dengan ini perlu adanya upaya pengelolaan yang tepat pada hutan ini. Hal ini berarti pengelolaan hutan mangrove harus berlangsung dalam batas-batas tertentu dan dengan mempertimbangkan kendala-kendala yang mungkin ditimbulkan oleh faktor lingkungan lainnya.

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan daerah kelautan, dari 5 (lima) kecamatannya berada di sepanjang 95 Kilometer pantai. Daerah yang berada disepanjang pantai ini memiliki hutan mangrove yang merupakan benteng terdepan, namun kondisinya sudah mengalami kerusakan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Pengelolaan Mangrove (2006) bahwa keseluruhan kawasan mangrove seluas 3.700,6 ha yang berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, maka kawasan mangrove tersebut saat ini, seluas 919,89 ha (24,8%) termasuk dalam kategori tidak rusak. Kawasan mangrove tersebut telah mengalami kerusakan dengan

tingkat yang berbeda. Wilayah seluas 576,49 ha (15,6%) termasuk dalam kategori rusak dan seluas 2.204,22 ha (59,6%) berada dalam kondisi rusak berat. Kecamatan Pantai Cermin, dengan keseluruhan luas mangrove (1.041,27 ha) terdapat dalam kategori rusak meliputi wilayah seluas 242,52 ha (23,3%) dan 798,76 ha (76,7%) berada dalam kondisi rusak berat.

Kecamatan Pantai Cermin merupakan kawasan pesisir pantai timur Indonesia, yang terdiri dari 12 desa dimana terdapat ekosistem mangrove. Desa yang dominan terdapat ekosistem mangrove adalah Desa Kota Pari. Dengan kata lain Desa Kota Pari mengalami kerusakan mangrove secara keseluruhan dengan kategori rusak dan sangat rusak. Kecamatan Pantai Cermin adalah pantai berpasir yang merupakan pantai yang didominasi oleh hamparan atau daratan pasir, baik yang berupa pasir hitam maupun pasir putih yang potensial untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Di kecamatan ini terdapat ekosistem mangrove yang jika ditinjau secara fisik sangat memenuhi syarat-syarat untuk pertambakan, seperti adanya pasang surut, sifat dan jenis tanah yang sesuai, serta teknis pembangunannya relatif mudah dan ekonomis.

Desa Kota Pari terdiri dari 11 (sebelas) dusun, 5 dusun yang berbatasan langsung dengan tepi laut (I, II, III, IV dan XI), namun hanya di wilayah Dusun III, IV dan XI yang terdapat hutan mangrove. Desa Kota Pari merupakan desa yang terdapat wilayah hutan mangrove sangat potensial untuk dikembangkan dalam bidang wisata, pertanian dan permukiman, oleh karena itu menyebabkan beberapa permasalahan terhadap hutan mangrove itu sendiri dan mengancam keberadaannya. Permasalah-permasalahan yang terjadi berupa kerusakan ekosistem yang dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap fungsi maupun manfaat hutan mangrove sehingga melakukan penebangan liar, pembangunan tambak yang

tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem hutan mangrove, terganggunya ekosistem hutan mangrove karena aktivitas wisata, dan terkendalanya pengelolaan hutan mangrove. Perlu adanya perhatian khusus terhadap hal masalah ini dalam bentuk pengelolaan hutan mangrove secara tepat baik dari pemerintah setempat maupun masyarakat dengan prinsip melindungi, mempelajari dan memanfaatkan. Menurut hasil wawancara Bapak Mukti selaku penduduk sekaligus ketua kelompok di desa ini, sudah ada kegiatan pengelolaan hutan mangrove meliputi penanaman, pemeliharaan, pemanfaatan dan rehabilitasi namun masih terdapat wilayah hutan yang rusak. Untuk itu kita harus mengetahui apakah pengelolaan hutan di desa ini sudah dilakukan secara tepat atau tidak. Pengelolaan yang tepat adalah pengelolaan secara lestari/terpadu, yaitu upaya menggabungkan antara kepentingan ekologis (konservasi ekosistem mangrove) dengan kepentingan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya.

## **B. Identifikasi Masalah**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan hutan mangrove di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai adalah : (1) Kerusakan ekosistem mangrove akibat erosi maupun penebangan liar (2)Kendala dalam pengelolaan ekosistem mangrove, (3) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat hutan mangrove, (4) Pembangunan tambak yang tidak memperhatikan keseimbangan kondisi mangrove, (5) Aktivitas wisata yang mengganggu ekosistem mangrove, (6) Pemanfaatan ekosistem mangrove oleh masyarakat.

### **C. Pembatasan Masalah**

Dari uraian identifikasi di atas maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti yaitu tentang pengelolaan hutan mangrove meliputi (penanaman, pemeliharaan, pemanfaatan dan rehabilitasi) dan kendala dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Sergai.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah dalam penelitian ini, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan hutan mangrove melalui penanaman, pemeliharaan, pemanfaatan dan rehabilitasi di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai?
2. Apa kendala dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan hutan mangrove melalui penanaman, pemeliharaan, pemanfaatan dan rehabilitasi di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Untuk mengetahui kendala pengelolaan hutan mangrove di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.

## **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi kepada Pemerintah atas kebijakan Pemerintah Kecamatan Pantai Cermin dalam menentukan kebijakan pengelolaan wilayah.
2. Memberikan informasi bagi pembaca maupun mahasiswa yang akan melanjutkan penelitian dalam topik yang sama dengan tempat yang berbeda.
3. Sebagai sumbangan Kepustakaan.

